

MODUL BELA NEGARA DAN KEPEMIMPINAN PANCASILA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR



Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
2019

Hak Cipta © Pada:

Lembaga Administrasi Negara Edisi Tahun 2019

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110

Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197

Fax. (62 21) 3800188

BELA NEGARA DAN KEPEMIMPINAN PANCASILA

Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
3. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol., Adm

TIM PENULIS MODUL:

1. Prof Dr. Cecep Darmawan, S. Pd., S.IP., M.Si, M.H;
2. Haryo B. Rahmadi, SE., M.Si (Han);
3. Gery Gugustomo, S.IP., M.Si (Han).

REKA CETAK :

COVER :

Jakarta - LAN - 2019

ISBN:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Deskripsi Singkat	6
C. Tujuan Pembelajaran	6
D. Indikator Hasil Belajar	6
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	7
BAB II MATERI	9
A. Materi Pokok I	9
B. Materi Pokok II	9
C. Materi Pokok III	11
D. Materi Pokok IV	17
E. Materi Pokok V	18
BAB III PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mungkin tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang semakin kompleks dewasa ini, keberadaan wawasan kebangsaan lah yang sejatinya telah dan akan terus menjaga segenap kesadaran, pemikiran, sikap, lisan, tindak, dan perilaku kita dalam koridor keselamatan dan keutuhan bangsa. Wawasan kebangsaan jua lah yang sebenarnya telah mendorong begitu banyak teladan dalam masyarakat bangsa Indonesia untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang masih diidap oleh bangsa kita. Demikian pula, wawasan kebangsaan menjadi pondasi aneka karya dan prestasi yang semakin membawa bangsa kita ke arah kemajuan di tengah peradaban dan kemanusiaan secara positif.

Secara komprehensif, wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Di dalam wawasan kebangsaan ini sebenarnya terkandung banyak sekali hal, mulai dari kearifan lokal, kisah, ide sederhana, hingga konsepsi yang kompleks, yang menginspirasi dan membanggakan, yang menghibur atau mengharukan, hingga yang melecut dan menggelorakan, atau singkatnya segala sesuatu yang dapat mendukung pemaknaan wawasan kebangsaan itu. Namun demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, maka kekayaan khazanah wawasan kebangsaan ini akan difokuskan pada konsepsi-konsepsi kebangsaan yang dapat dikatakan bersifat wajib untuk diketahui dan dipahami,

terutama dalam mengawal keberadaan, peran, dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konsepsi-konsepsi wajib bagi ASN ini pertama sekali meliputi keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan Pancasila dalam PKA ini akan difokuskan pada keberadaan Pancasila sebagai visi kemerdekaan. Kemudian pembahasan mengenai UUD NRI Tahun 1945 akan difokuskan pada pokok-pokok struktur dan sistematika dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Untuk konsepsi NKRI pembahasan akan dikaitkan dengan konsepsi Ketahanan Nasional.

Keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diuraikan di atas selanjutnya akan disinergikan dengan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila, kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Sebagai penggenap konteks bela negara, maka Kewaspadaan Nasional menjadi konsepsi selanjutnya yang akan dibahas di dalam modul ini guna membentuk kerangka kerja berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara.

Pada tataran PKA, pembahasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara akan diarahkan pada pembangunan integritas dan kinerja organisasi yang berkesinambungan. Sebagaimana telah diketahui bahwa keberadaan etika dan akuntabilitas yang didasari pengetahuan serta pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara adalah modal pembangunan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendefinisikan integritas sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan

yang memancarkan kewibawaan; kejujuran (Badan Bahasa, 2016). Untuk penggunaan dalam kata, KBBI Daring versi yang lebih baru dari Setiawan (2019) memberikan integritas nasional sebagai contoh, dimana integritas nasional didefinisikan sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Mengacu kepada makna tersebut, integritas dalam konteks individu dapat dimaknai sebagai keutuhan dan konsistensi etika, sikap, perilaku, dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula bila mengacu kepada tingkatan perbuatan manusia menurut Sugiono (2012), maka integritas dimaknai sebagai keutuhan dan konsistensi niat, tujuan/hasil, dan cara dari perbuatan seseorang.

Dalam menjaga individu berintegritas, diperlukan peran dan sistem integritas organisasi (Pusdikmin, 2017). Namun demikian, integritas organisasi atau komunitas merupakan hasil upaya dan cerminan dari anggota-anggota yang berintegritas, sehingga organisasi yang berintegritas hanya akan terwujud bersamaan dengan terwujudnya anggota-anggota yang berintegritas (co-realization atau co-actualization) (Endro, 2017). Dalam praktiknya, upaya aktualisasi integritas banyak mendapat tantangan dari berbagai perilaku tidak etis dan koruptif, kurangnya akuntabilitas, serta rendahnya kompetensi (Galtung, 2013). Dengan logika yang sama, Galtung (2013) menegaskan bahwa integritas merupakan hasil interaksi antara etika, akuntabilitas, dan kompetensi, tanpa korupsi dan atau perilaku koruptif.

Sebagaimana dapat kita telaah pula dalam Galtung (2013), Pusdikmin (2017), maupun Endro (2017), konteks integritas hampir selalu diposisikan sebagai lawan dari korupsi. Tanpa perlu berteori, korupsi dan atau perilaku koruptif memang merupakan lawan dari etika dan akuntabilitas yang menjadi bangun penyusun integritas. Namun demikian, menarik untuk diperhatikan bahwa Galtung (2013) tetap mengeksplisitkan frasa “tanpa korupsi”, meskipun telah ada etika, akuntabilitas, dan kompetensi. Padahal akuntabilitas juga dapat dikatakan

sebagai komplemen bagi transparansi. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, apakah masih ada peluang bagi timbulnya korupsi dan atau perilaku koruptif ketika etika, akuntabilitas, dan transparansi telah mewujud?

Jawaban bagi pertanyaan pada akhir alinea di atas terdapat dalam kutipan yang sudah sangat kita kenal dari Lord Acton (1834-1902), seorang sejarawan berkebangsaan Inggris yang mengatakan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Dorongan untuk melakukan korupsi atau perilaku koruptif memang pada faktanya berkaitan dengan kekuasaan dan atau kemampuan untuk dapat melakukannya (Martin, 1998). Mengacu kepada definisi dari Badan Bahasa (2016), terlihat bahwa memang salah satu dampak dari integritas adalah kemampuan dan kewibawaan. Dengan demikian jelaslah mengapa Galtung (2013) tetap mengeksplisitkan frasa “tanpa korupsi”, meskipun telah ada etika, akuntabilitas, dan kompetensi, karena kemampuan dan kewibawaan bukan tidak mungkin mendorong timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks pelayanan publik, integritas organisasi pelayanan publik akan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara keberadaan etika, kompetensi, akuntabilitas, dan tentunya transparansi yang menjadi pembangun integritas, juga akan meningkatkan kepuasan publik. Resultan kepercayaan dan kepuasan publik selanjutnya menjadi indikator penting bagi kinerja organisasi. Namun demikian, jika kinerja tersebut tidak lahir dari pemahaman serta aktualisasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, maka kinerja organisasi justru dapat menjadi kontraproduktif karena terdeviasi dari amanah negara dan rakyat yang harus diemban oleh ASN.

Sebagai pemungkas, pada saat modul ini mulai disusun di tahun 2019, dalam Antons (2009) diungkapkan bahwa pemerintah telah menganggarkan 313 Trilyun Rupiah atau setara dengan 16% nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk membayar gaji 4,4 juta ASN. Dengan populasi Indonesia yang hampir mencapai 263 juta jiwa pada tahun 2018

(CIA, 2018), maka dapat dikatakan bahwa 16% persen APBN telah dialokasikan hanya untuk 1,7% penduduk saja. Jika korupsi dan perilaku koruptif muncul menggerus benteng etika dan akuntabilitas, hal ini dipastikan akan menihilkan makna kompetensi, menghancurkan integritas organisasi dan kepercayaan publik, meruntuhkan kinerja organisasi dan kepuasan publik, yang juga berarti pengkhianatan terhadap amanah negara dan pengorbanan rakyat.

B. Deskripsi Singkat

Memfasilitasi peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika UUD NRI tahun 1945, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

C. Tujuan Pembelajaran

Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika UUD NRI tahun 1945, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

D. Indikator Hasil Belajar

1. Peserta mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika UUD NRI tahun 1945, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan

Nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh.

2. Peserta mampu mengaktualisasikan kaitan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh dengan pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Aktualisasi Cinta Tanah Air melalui perspektif Astagatra
 - a. Pemutaran video dan diskusi tentang isu kontemporer terkait Aktualisasi Cinta Tanah Air
 - b. Briefing singkat perspektif Astagatra.
 - c. Desk research latar belakang informasi.
 - d. Analisis faktor penghambat dan pendorong.
 - e. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan astagatra.
 - f. Konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok
2. Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan sistematika UUD NRI tahun 1945
 - a. Pemutaran video dan diskusi tentang isu kontemporer terkait Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
 - b. Briefing singkat amanat konstitusi.
 - c. Desk research latar belakang informasi.
 - d. Analisis faktor penghambat dan pendorong.
 - e. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan tujuan negara.
 - f. Konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok
3. Aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN.
 - a. Pemutaran video dan diskusi tentang isu kontemporer terkait keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila
 - b. Briefing singkat kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila.
 - c. Desk research latar belakang informasi.
 - d. Analisis faktor penghambat dan pendorong.

- e. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan sila-sila Pancasila.
- f. Konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok
- 4. Keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN.
 - a. Pengembangan skenario dasar berbasis analisis terpilih.
 - b. Penetapan peran dan pemeran.
 - c. Pemantauan serta pencatatan dialog dan resolusi.
 - d. Analisis perkembangan dialog berbasis nilai-nilai dasar bela negara dan tuntutan kinerja
- 5. Pemaparan Kelompok: Aktualisasi Kemampuan Awal Bela Negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara
 - a. Review dan konsolidasi hasil studi kasus dan penugasan sebelumnya.
 - b. Briefing dan diskusi: Kondisi ideal astagatra sebagai acuan penyempurnaan ide kreatif kemampuan awal bela negara.
 - c. Penyempurnaan ide kreatif penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal faktor penghambat integritas dan kinerja pelayanan publik.
 - d. Penyempurnaan formulasi Kemampuan Awal Bela Negara di tiap-tiap gatra Ketahanan Nasional

BAB II

MATERI

A. Materi Pokok I

1. Aktualisasi Cinta Tanah Air Melalui Perspektif Astagatra
2. Indikator keberhasilan
3. Mengaktualisasikan analisis kolaboratif berbasis Astagatra untuk diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer
4. Uraian dan contoh
 - a. Pemutaran dan Diskusi Video Isu Kontemporer Terkait Aktualisasi Cinta Tanah Air
 - b. Briefing singkat perspektif Astagatra
 - c. Desk research latar belakang informasi.
 - d. Analisis faktor penghambat dan pendorong.
 - e. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan astagatra.
 - f. Konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok.
5. Latihan
6. Rangkuman
7. Evaluasi Materi Pokok 1
8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

B. Materi Pokok II

1. Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Sistematisa UUD NRI Tahun 1945
2. Indikator keberhasilan
Mengaktualisasikan analisis kolaboratif berbasis amanat konstitusi untuk diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer
3. Uraian dan contoh

- a. Pemutaran dan Diskusi Video Isu Kontemporer Terkait Aktualisasi Cinta Tanah Air
- b. *Briefing* singkat amanat konstitusi.

Tujuan negara, sebagaimana tertulis dalam amanat konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai perbandingan, negara Amerika memiliki suatu konsep strategis yang yang disebut dengan DIME yang sudah digunakan sejak tahun 1960-an. DIME sebagai representasi kekuatan nasionalnya merupakan singkatan dari *Diplomacy* (diplomasi), *Informational* (informasional), *Military* (militer), dan *Economy* (ekonomi). Keempat elemen tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

Katakan saja mengurangi diplomasi akan berdampak pada pelemahan posisi negara di mata internasional. Informasional merupakan gambaran untuk kemudahan dalam mengakses informasi yang akan berdampak pada kecerdasan. Militer menjaga keamanan dalam kegiatan berbisnis dan ekonomi memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas sumber dayanya. Setiap elemen tersebut memiliki pengaruh yang sangat simultan terhadap unsur lainnya.

Jauh melampaui Amerika Serikat, Indonesia sudah menerapkan keempat elemen kekuatan tersebut dalam Tujuan Negara. Perlindungan untuk segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (militer), mencerdaskan kehidupan bangsa (pendidikan/ informasi), memajukan kesejahteraan umum (ekonomi), dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia (diplomasi) menjadi

konsep yang sama seperti dalam DIME yang AS cetuskan sejak tahun 1960-an, namun para pendiri bangsa kita sudah menyadarinya lebih lama dan menuangkannya dalam konstitusi negara (Pembukaan UUD) sejak 1945.

Di era globalisasi yang semakin tak terbatas dalam akses informasi dan persaingan di berbagai bidang dan tataran semakin meningkat. Di sinilah relevansi tujuan negara yang diterapkan dalam nilai-nilai Bela Negara menjiwai semangat perjuangan para pahlawan dan kita patut berterima kasih dan bersyukur karena perjuangan dan pengorbanan merekalah kita bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini.

Banyak hal yang memprihatinkan ketika banyak dari kita justru menjadikan dunia Barat sebagai role model dan lupa bahwa sebenarnya kita memiliki khazanah kearifan yang begitu luas dan dalam warisan para pejuang. Entah apakah karena menganggap dunia Barat lebih menyilaukan atau karena warisan tersebut semakin dalam terkubur.

- c. *Desk research* latar belakang informasi.
 - d. Analisis faktor penghambat dan pendorong.
 - e. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan tujuan negara.
 - f. Konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok
- 4. Latihan
 - 5. Rangkuman
 - 6. Evaluasi Materi Pokok 2
 - 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

C. Materi Pokok III

- 1. Aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN
- 2. Indikator keberhasilan

Mengaktualisasikan analisis kolaboratif berbasis sila-sila Pancasila untuk diaplikasikan dalam berbagai isu kontemporer.

3. Uraian dan contoh

- a. Pemutaran dan Diskusi Video Isu Kontemporer Terkait Aktualisasi Cinta Tanah Air
- b. *Briefing* singkat kedudukan, peran, dan dan fungsi Pancasila.

Kata pemimpin sering kita dengar, namun apakah kita benar-benar memahami apa itu arti “Pemimpin”. Sebelum kita memahami apa itu Pemimpin, kita harus mengetahui dulu apa syarat untuk menjadi pemimpin.

Apakah pemimpin harus tegas? Pada nyatanya teman sekelas yang paling tidak tegas ditunjuk sebagai ketua kelas karena bisa disuruh-suruh. Apakah pemimpin harus independen? Nyatanya orang yang independen terkadang sesuka hati memerintah atas sekehendak hatinya. Apakah pemimpin harus bisa mendengarkan omongannya? Berarti tidak ada harapan bagi tuna wicara untuk menjadi pemimpin.

Maka hal yang paling sederhana dan syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin adalah ada yang dipimpin. Ya sederhana itu, ada yang dipimpin, paling tidak memimpin diri sendiri. Bagaimana bisa seseorang disebut pemimpin sedangkan tidak ada yang dia pimpin?

Agar seseorang bisa disebut pemimpin maka harus ada yang dipimpin. Lalu bagaimana kriteria orang yang dipimpin? Yang pasti yang dipimpin harus orang. Akan sulit jika seseorang memimpin hewan, pepohonan, atau bahkan udara.

Jadi syarat pemimpin adalah ada yang dipimpin dan yang dipimpin adalah orang (manusia).

Seorang pemimpin yang baik harus paham akan kebutuhan orang yang dipimpinnya. Hal apa saja yang dibutuhkan para pengikut atau orang yang dipimpin? Ada yang mengatakan makanan dan minuman, bernapas, berpakaian, bekerja, ilmu, teman, pernikahan, pengakuan, dan sebagainya. Itu semua memang benar. Tapi agar pembahasan mengenai apa yang dibutuhkan orang lebih terarah dan tidak terlalu melebar kemana-mana alangkah baiknya kita merujuk ke teori Maslow tentang kebutuhan dasar manusia.

Teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia dapat digambarkan dalam sebuah bentuk piramida, yang dimana kebutuhan paling dasar adalah kebutuhan fisiologis atau fisik, lalu di atasnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri.

Jika kita konversikan teori Maslow tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari kita maka kebutuhan fisiologis sama dengan kebutuhan akan makan nasi (sebagai makanan pokok orang Indonesia secara umum). Kebutuhan akan rasa aman sama dengan memiliki mobil sendiri saat bepergian. Kebutuhan akan rasa kasih sayang sama dengan kebutuhan akan hadirnya teman, katakanlah teman kuliah yang sampai saat ini masih sering menemani kita mengobrol. Kebutuhan akan penghargaan sama dengan persaingan dalam bekerja antar pekerja atau karyawan, dari memenangkan persaingan ini seseorang bisa mendapatkan penghargaan. Kebutuhan puncak tertinggi adalah aktualisasi diri yang sama dengan pengakuan yang tercermin dari kepakaran atau keahlian seseorang.

Apakah sudah cukup sampai lima dasar kebutuhan tadi dalam hidup? Apakah tidak ada keinginan manusia untuk terus berkembang dan meningkat kebutuhannya seiring dengan waktu dan usaha mereka? Tentu ada. Maka kebutuhan tersebut akan berkembang seperti berikut:

Makan nasi bertambah menjadi makan spageti. Aman berkendara meningkat jadi rasa aman memiliki rumah dan satpam. Kasih sayang teman meningkat menjadi berkenalan dengan pejabat. Persaingan antar karyawan meningkat menjadi persaingan antar direksi. Pengakuan kepakaran meningkat menjadi pengakuan tingkat nasional.

Sudah cukup? Ternyata masih bisa meningkat lagi.....

Makan spageti meningkat menjadi makan daging steak. Kepemilikan rumah meningkat menjadi memiliki villa di puncak. Pertemanan dengan pejabat meningkat jadi kenal dekat dengan presiden. Persaingan antar direksi meningkat menjadi persaingan antar pimpinan DPR. Pengakuan kepakaran tingkat nasional meningkat menjadi kepakaran tingkat internasional.

Sudah cukup? Dan ternyata di atas langit masih ada langit.

Makan daging steak berkembang menjadi makan Kaviar (telur ikan yang dinobatkan sebagai makanan termahal di dunia). Punya villa berkembang menjadi memiliki pulau pribadi. Pertemanan dengan presiden meningkat menjadi pertemanan dengan Sekjen PBB (persatuan Bangsa-bangsa). Persaingan antar pimpinan DPR meningkat menjadi persaingan antar kepala negara. Pengakuan secara internasional meningkat menjadi Ketua Juri Nobel Internasional.

Apakah sudah sampai batasnya? Ternyata masih bisa meningkat.

Memakan Kaviar meningkat menjadi kepemilikan pabrik Kaviar. Kepemilikan pulau pribadi meningkat menjadi keinginan membangun negara sendiri. Pertemanan meningkat menjadi bersahabat dengan Luke Skywalker (Star Wars). Persaingan antar kepala negara meningkat menjadi persaingan antar pimpinan planet. Pengakuan

sebagai Ketua Juri Nobel meningkat menjadi Ketua Pemilihan Miss Galaxy.

Begitulah kebutuhan manusia yang akan selalu meningkat dari yang paling dasar hingga yang tidak terpikirkan melawan batas nalar manusia. Jika kebutuhan dasar yang berkembang menjadi keinginan ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada aksi saling menjatuhkan dan saling menghancurkan demi memenuhi nafsu semata.

Sekarang kita coba modifikasi analoginya. Kebutuhan makan kita cari bareng-bareng, lalu rasa aman kita wujudkan dengan saling melindungi, persaingan dan pertemanan kita lakukan secara seimbang, tidak ada rasa mendendam, terakhir kita saling menghargai dengan mengakui eksistensi setiap orang secara manusiawi dan beradab. Dijamin deh hitup akan terasa tentrem roh jinawi.

Apakah cukup pengakuan antar sesama manusia? Ternyata manusia diciptakan sebagai makhluk spiritualitas. Dalam keadaan segenting apapun mereka akan tetap ingat pada Tuhannya, walaupun penuh berlumur dosa dan sering mengabaikan perintah-Nya. Pengakuan terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akan selalu ada. Kehadiran Tuhan dalam setiap jiwa insan akan selalu dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hati yang sifatnya spiritual. Bisikan dari Tuhan ini yang akan mengarahkan manusia ke jalan yang benar agar tidak selalu mengikuti hawa nafsunya.

Ternyata semua unsur kebutuhan manusia itu terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Teori Maslow

Teori Maslow	Bentuknya	Nilai-nilai Pancasila
-	-	Pengakuan terhadap Tuhan YME (Sila ke-1)
Aktualisasi diri	Pengakuan semua orang	Pengakuan yang dilakukan secara manusiawi dan beradab (Sila ke-2)
Penghargaan	Persaingan dan pertemanan yang dilakukan dengan seimbang	Kekompakan dalam persaingan dan pertemanan yang mencerminkan persatuan Indonesia (Sila ke-3)
Kasih sayang		
Rasa aman	Saling melindungi	Pemimpin yang selalu memberikan rasa aman terhadap rakyatnya (Sila ke-4)
Kebutuhan fisiologis	Mencari makan bersama-sama	Kesejahteraan sosial bagi sesama, selalu disimbolkan dengan padi dan kapas/pangan dan sandang (Sila ke-5)

Dari tabel di atas kita bisa melihat dalam Teori Maslow hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya memperhatikan kebutuhan duniawi manusianya, akan tetapi juga kebutuhan spiritualitasnya. Maka Pancasila sebagai pedoman nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sudah melampaui hingga kepada kebutuhan bathiniyah. Hal ini senada yang dikatakan oleh Presiden

ke satu Republik Indonesia, Soekarno, dalam pidatonya sebelum pembebasan Irian Barat, bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan Insan Alkamil, membangun manusia seutuhnya dan berbahagia di kolong langit ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Maka dari itu pemahaman Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang memahami dan mengupayakan perwujudan kebutuhan manusia yang paripurna yang tidak hanya berkuat antara kepentingan ego dan material semata (Haryo B. Rahmadi, Pakar Setjen Wantannas, 2019).

- c. *Desk research* latar belakang informasi.
 - d. Analisis faktor penghambat dan pendorong.
 - e. Pemetaan faktor berpengaruh berdasarkan sila-sila Pancasila.
 - f. Konsolidasi faktor berpengaruh lintas kelompok
- 4. Latihan
 - 5. Rangkuman
 - 6. Evaluasi Materi Pokok 3
 - 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

D. Materi Pokok IV

- 1. Keseimbangan Kepentingan Sektoral dan Kinerja Organisasi
- 2. Indikator keberhasilan

Menginternalisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konflik kepentingan sektoral sebagai sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN.

- 3. Uraian dan contoh
 - a. Pemilihan Analisis dari Studi Kasus yang telah Dilakukan
 - b. Pengembangan Skenario Dasar Berbasis Analisis Terpilih

- c. Penetapan Peran dan Pemeran
 - d. Pemantauan serta Pencatatan Dialog dan Resolusi
 - e. Analisis Perkembangan Dialog Berbasis Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Tuntutan Kinerja
4. Latihan
 5. Rangkuman
 6. Evaluasi Materi Pokok 4
 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

E. Materi Pokok V

1. Penugasan Pemaparan Kelompok: Aktualisasi Kemampuan Awal Bela Negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara.

2. Indikator keberhasilan

Menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dan konsepsi kebangsaan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan mengembangkan konsep kepemimpinan dalam mendukung integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud kemampuan awal bela negara

3. Uraian dan contoh

- a. Review dan Konsolidasi Hasil Studi Kasus dan Penugasan Sebelumnya
- b. Briefing dan Diskusi: Kondisi Ideal Astagatra sebagai Acuan Penyempurnaan Ide Kreatif Kemampuan Awal Bela Negara
- c. Penyempurnaan Ide Kreatif Penerapan Wawasan Kebangsaan, dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara guna Menangkal Faktor Penghambat Integritas dan Kinerja Pelayanan Publik

- d. Penyempurnaan Formulasi Kemampuan Awal Bela Negara di Tiap-Tiap Gatra Ketahanan Nasional
4. Latihan
5. Rangkuman
6. Evaluasi Materi Pokok 5
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

BAB III PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- Antons (Ed.) (2019). ASN makin sejahtera. Infografis – Antara News. Diakses pada 15/10/2019-15:50 dari <https://www.antaranews.com/infografis/790052/asn-makin-sejahtera>
- Badan Bahasa (2016). integritas - KBBI Daring Kemdikbud. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (Badan Bahasa). Diakses pada 15/10/2019-20:13 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>
- Galtung, F. (2013). The Fix-Rate: A Key Metric for Transparency and Accountability. Working Paper Number 2. London: Integrity Action.
- Gunardi, E. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. Jurnal INTEGRITAS, 3(1), 131-152.
- Martin, B. (1998). Information Liberation. London: Freedom Press.
- Pusdikmin (2017). Sadar Anti Korupsi - Mata Diklat Anti Korupsi. Lembaga Pendidikan Polri - Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin).
- Setiawan, E. (2019). integritas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Diakses pada 15/10/2019-20:24 dari <https://kbbi.web.id/integritas>
- Soegiono, T. (2012). Filsafat Pendidikan Teori dan Praktik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.